



PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

REVITALISASI PERAN PENYULUH PERTANIAN INDONESIA

BIDANG KEGIATAN:
PKM GAGASAN TERTULIS (PKM-GT)

Diusulkan oleh:

Ketua Kelompok	:	Firza Maudi	(H34060227 / t.a. 2006)
Anggota Kelompok	:	Syura Awathif Ahmad A. W. Fithriani Rahayu	(H34063101 / t.a. 2006) (H34070080 / t.a. 2007)

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2009**



PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

REVITALISASI PERAN PENYULUH PERTANIAN INDONESIA

BIDANG KEGIATAN:
PKM GAGASAN TERTULIS (PKM-GT)

Diusulkan oleh:

Ketua Kelompok	:	Firza Maudi	(H34060227 / t.a. 2006)
Anggota Kelompok	:	Syura Awathif Ahmad A. W. Fithriani Rahayu	(H34063101 / t.a. 2006) (H34070080 / t.a. 2007)

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2009**

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK

1. Ketua Pelaksana Kegiatan

- a. Nama Lengkap : Firza Maudi
- b. NRP : H34060227
- c. Fakultas / Departemen : Ekonomi dan Manajemen /Agribisnis

2. Anggota Pelaksana Kegiatan

- a. Nama Lengkap : Syura Awathif Ahmad A. W.
- b. NRP : H34063101
- c. Fakultas / Departemen : Ekonomi dan Manajemen /Agribisnis

- a. Nama Lengkap : Fithriani Rahayu S.M
- b. NRP : H34070080
- c. Fakultas / Departemen : Ekonomi dan Manajemen /Agribisnis

**LEMBAR PENGESAHAN
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA**

1. Judul Kegiatan : Revitalisasi Peran Penyuluh Pertanian Indonesia
2. Bidang Ilmu : PKM Gagasan Tertulis
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
 - a. Nama Lengkap : Firza Maudi
 - b. NIM : H34060227
 - c. Departemen : Agribisnis
 - d. Universitas : Institut Pertanian Bogor
 - e. Alamat Rumah dan HP : Pondok Deboy, Babakan Lio Kompleks IPB Balumbang Jaya No.8 RT 02/RW 09 Dramaga HP. 085710001947
 - f. Alamat email : firzamaudi@rocketmail.com
4. Anggota Pelaksana Kegiatan : 2 (dua) orang
5. Dosen Pendamping
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Etriya, SP, MM
 - b. NIP : 132 311 854
 - c. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Bedahan RT 07 / RW 01 No.18 Pabuaran, Cibinong – Bogor HP 08121823308

Bogor, 6 April 2009

Menyetujui,
Ketua Departemen

Ketua Pelaksana Kegiatan

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS
NIP. 131 415 082

Firza Maudi
NIM. H3406227

Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan

Dosen Pendamping

Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS
NIP. 131 473 999

Etriya, SP, MM
NIP. 132 311 854

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Revitalisasi Peran Penyuluhan Pertanian Indonesia”**. Karya tulis ini diajukan untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa – Gagasan Tertulis (PKM-GT) tahun 2009.

Karya tulis ini mencoba memaparkan kondisi masa lalu penyuluhan pertanian lapangan (PPL) di Indonesia dan juga masa kini, kemudian menjelaskan bagaimana peran dan fungsi dari penyuluhan pertanian yang ideal. Serta dipaparkan mengenai alternatif solusi untuk menukseskan program revitalisasi penyuluhan di Indonesia. Karya tulis ini kami susun sebagai masukan bagi para penyuluhan pertanian, pemerintah sebagai peregulasi, institusi pendidikan, dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan penyuluhan pertanian.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami harapkan.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya tulis ini. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun bagi penyuluhan pertanian di Indonesia.

Bogor, 6 April 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK	ii
LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN	ix
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Perumusan Masalah	2
Tujuan	2
TELAAH PUSTAKA	3
METODE PENULISAN	5
ANALISIS DAN SINTESIS	6
Dinamika Penyelenggaraan Penyuluhan	6
Kondisi Penyuluhan Pertanian Masa Kini	7
Penyuluhan yang Ideal dan Paradigma Baru Penyuluhan	9
Alternatif Solusi Guna Mendukung Revitalisasi Penyuluhan	12
PENUTUP	15
Kesimpulan	15
Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	17

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Peta Kebutuhan Rekruitmen Tenaga Penyuluhan Perikanan 2009 – 2013	18
--	----

DAFTAR GAMBAR

1. Grafik 1. Jumlah Penyuluhan Pertanian, PBB, dan Ratio Penyuluhan dengan Rumah Tangga Petani, Penyuluhan/Kecamatan di Jawa Barat Tahun 2005	17
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|---|----|
| 1. Lampiran 1. Data Pendukung | 17 |
| 2. Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup | 19 |

RINGKASAN

Potret sektor pertanian Indonesia menunjukkan tren kinerja yang menurun selama beberapa puluh tahun. Dalam menanggapi masalah ini, strategi pembangunan nasional perlu ditujukan untuk memperhatikan kembali salah satu bidang keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu sektor pertanian. Untuk itu, Kabinet Indonesia Bersatu menetapkan Revitalisasi Pertanian sebagai salah satu strategi utama pembangunan nasional 2005-2009, guna memajukan kembali pertanian Indonesia.

Program Revitalisasi Pertanian difokuskan pada penataan kelembagaan, peningkatan kuantitas dan kualitas pertanian, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan kelembagaan dan kepemimpinan petani, pengembangan kerjasama antara sistem penyuluhan pertanian dan agribisnis, pembiayaan pertanian, dan diseminasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi pertanian di pedesaan. Dalam pelaksanaan usaha revitalisasi pertanian tersebut, peran dari penyuluh pertanian lapangan (PPL) sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu komponen utama untuk mensukseskan program ini.

Keberadaan tenaga penyuluh dalam mendukung program revitalisasi pertanian Indonesia haruslah memperoleh perhatian yang sangat serius dari pemerintah dan seluruh pihak yang terkait. Sehingga berbagai upaya harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas penyuluhan pertanian, demi mendukung tercapainya tujuan revitalisasi pertanian.

Pelaksanaan penyuluhan di Indonesia sendiri senantiasa mengalami gejolak dalam perkembangannya. Sejak awal peresmian pelaksanaannya pada tahun 1905, kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia senantiasa diposisikan sebagai instrumen untuk mensukseskan program-program pemerintah. Kegiatan penyuluhan efektif dilaksanakan dengan pendekatan pola pembangunan yang sentralistik, terbukti dengan tercapainya swasembada beras Indonesia tahun 1984, yang dianggap sebagai puncak prestasi penyuluhan pertanian Indonesia. Tahun 1984 hingga 1991, penyuluhan pertanian dikelola Sekretariat Badan Pengendali BIMAS. Selama periode ini penyuluhan pertanian dipergunakan sebagai instrumen untuk memecahkan masalah kelangkaan pangan, khususnya beras. Namun, periode ini menunjukkan gejala krisis penyuluhan pertanian di Indonesia, yang terus berlanjut hingga saat ini, dan menunjukkan pengaruh signifikannya berupa penurunan kinerja pertanian Indonesia.

Program revitalisasi berupaya memperbaiki sistem dan kinerja penyuluhan pertanian yang sejak akhir 1990-an sangat menurun kondisinya. Salah satu tonggak pelaksanaan revitalisasi penyuluhan adalah Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) No. 16 Tahun 2006. Undang-undang ini menyebutkan perlunya penataan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, dari tingkat pusat sampai dengan kecamatan dan menyediakan sumber dana yang merupakan kontribusi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini merupakan titik awal pemberdayaan petani melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan pertanian PNS, swasta, dan penyuluhan pertanian swadaya.

Sebagai tindak lanjut Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan Presiden pada Juli 2005, pada 3 Desember 2005 di Sumatera Selatan, Menteri Pertanian mencanangkan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP). Pada hakikatnya, Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah upaya mendudukkan, memerankan, dan memfungsikan serta menata penyuluhan pertanian agar terwujud kesatuan pengertian, kesatuan korp, dan arah kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, program perbaikan sistem penyuluhan pertanian masih mengalami berbagai kendala, diantaranya adalah: kekurangan jumlah tenaga penyuluh (PPL), persebaran PPL yang tidak merata, kualitas kinerja para penyuluh yang menurun akibat kebijakan otonomi daerah pemerintah yang dapat dikatakan kurang mendukung usaha pengembangan penyuluhan, ketidaksesuaian orientasi peran, fungsi, dan kerja penyuluh dengan yang diharapkan, serta kualitas SDM penyuluhan yang kurang memadai.

Guna mengatasi berbagai kendala pelaksanaan revitalisasi penyuluhan, diperlukan kerja dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, yaitu pemerintah, institusi pendidikan, beserta seluruh masyarakat, khususnya para pelaku pertanian sebagai objek dari pelaksanaan program ini secara terintegrasi. Sudah saatnya PPL pun mengubah paradigma penyuluhan itu sendiri.

Paradigma baru dari penyuluhan yang perlu dibangun adalah penyuluhan sebagai jasa informasi, penerapan sistem lokalitas, berorientasi agribisnis, pendekatan kelompok, fokus pada kepentingan petani, pendekatan humanistik-egaliter, profesionalisme penyuluhan, akuntabilitas, dan kemampuan untuk memuaskan petani dengan memenuhi berbagai kebutuhan mereka, terutama dalam bidang usaha pertanian yang mereka lakukan. Peran penting PPL adalah sebagai fasilitator untuk membangkitkan dan memunculkan kemampuan dan kepercayaan diri petani untuk menganalisa pilihan-pilihan yang ada serta konsekuensi dari setiap pilihan itu, dengan menumbuhkan rasa percaya diri petani untuk memecahkan persoalan mereka sendiri. Penyuluhan dengan para penyuluhnya merupakan penghubung yang bersifat dua arah (*two way traffic*), yakni menghubungkan: (1) pengetahuan yang dibutuhkan petani dan pengalaman yang biasa dilakukan oleh petani, (2) pengalaman baru yang terjadi pada pihak para ahli dan kondisi nyata petani.

Proses pelaksanaan revitalisasi penyuluhan perlu mengacu pada UU No. 16 tahun 2006, dengan memantapkan fungsi Badan Penyuluhan Pusat dan Komisi Penyuluhan Nasional dalam menentukan kebijakan penyuluhan Indonesia. Kegiatan penyuluhan harus dilakukan terintegrasi antara badan pelaksana penyuluhan di berbagai tingkat wilayah, balai penyuluhan, dan pos penyuluhan di desa-desa yang merupakan suatu titik kegiatan penyuluhan terdekat dengan objek penyuluhan, yaitu petani.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Potret sektor pertanian Indonesia menunjukkan tren kinerja yang menurun selama beberapa puluh tahun. Faktor utamanya adalah karena sektor pertanian kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. PDB Indonesia yang disumbang sektor pertanian mengalami penurunan, yakni tahun 2000 sebanyak 15%, menjadi 12% pada akhir 2008. Hal ini juga dipengaruhi penurunan kegiatan pembiayaan sektor pertanian oleh bank komersial, yang menyebabkan pertumbuhan aktivitas sektor pertanian menurun dari tahun 2004 hingga Januari 2009, yaitu kredit menurun 0.7%. (*Indonesian Banking Statistics-Vol. 7, No. 2, January 2009*)

Hal ini menunjukkan bahwa sudah selayaknya strategi pembangunan nasional kembali ditujukan untuk memperhatikan salah satu keunggulan yang dimiliki Indonesia, yaitu sektor pertanian. Untuk itu Kabinet Indonesia Bersatu menetapkan Revitalisasi Pertanian sebagai salah satu strategi utama pembangunan nasional 2005-2009, guna memajukan kembali pertanian Indonesia.

Program Revitalisasi Pertanian difokuskan pada penataan kelembagaan, peningkatan kuantitas dan kualitas, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan kelembagaan dan kepemimpinan petani, pengembangan kerjasama antara sistem penyuluhan pertanian dan agribisnis, pembiayaan pertanian, dan diseminasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi pertanian di pedesaan. Contoh program pemerintah terkait Revitalisasi Pertanian adalah Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Prima Tani yang bertujuan menciptakan inovasi pertanian, dan sebagainya. Program-program tersebut membutuhkan peran dari penyuluhan pertanian lapangan (PPL).

Tenaga PPL sangat berperan dalam mendampingi peserta program, yang terdiri dari petani, kelompok tani (poktan), dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Hal ini dikuatkan dalam UU No. 16 tahun 2006 tentang SPPK mengenai fungsi penyuluhan, yaitu sebagai fasilitator kegiatan pembelajaran, pengembangan kepemimpinan, mempermudah akses informasi, dan mengembangkan pertanian sehingga memiliki daya saing.

Jumlah desa di Indonesia yang mencapai 69.929 desa, hampir seluruhnya memiliki keterkaitan dengan usaha revitalisasi pertanian. Dari sejumlah desa tersebut, baru sekitar 40.000 desa yang memiliki PPL, terdiri atas 24.000 PPL PNS dan 16.000 PPL non-PNS (karyawan lepas), sehingga masih memerlukan sekitar 26.000 orang tenaga penyuluhan pertanian untuk memenuhi target program “satu desa satu penyuluhan” dalam revitalisasi pertanian. (Anton Apriyantono, 2009). Permasalahan pada komponen penyuluhan tidak hanya dari segi jumlah saja, namun juga kualitas SDM, sehingga penyuluhan menjadi salah satu faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan program-program pendukung revitalisasi pertanian. Berdasarkan studi kasus di Sulawesi Selatan oleh SMERU tahun 2002, penyuluhan tidak dapat mendampingi petani dengan baik dalam mengkomunikasikan program KUT, sehingga petani menganggap dana yang ada merupakan dana hibah, yang sebenarnya merupakan kredit yang harus dikembalikan dengan bunga tertentu.

Keberadaan tenaga penyuluhan dalam mendukung program revitalisasi pertanian Indonesia haruslah memperoleh perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Sehingga berbagai upaya harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas penyuluhan pertanian, demi mendukung tercapainya tujuan revitalisasi pertanian.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan kondisi Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) di Indonesia?
2. Bagaimana penyuluhan menjalankan fungsi dan perannya secara ideal?
3. Bagaimana alternatif solusi untuk mengoptimalkan sistem penyuluhan yang kompeten dalam mendukung kebijakan revitalisasi pertanian?

Tujuan

1. Memaparkan kondisi Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) di Indonesia.
2. Mengidentifikasi fungsi dan peran ideal para penyuluhan.
3. Merancang berbagai alternatif solusi untuk mengoptimalkan sistem penyuluhan yang kompeten dalam mendukung kebijakan revitalisasi pertanian.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Penyuluhan Pertanian

Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Setiana. L. 2005). Dalam bukunya A.W. van den Ban dkk. (1999) dituliskan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Penyuluhan pertanian adalah suatu upaya untuk terciptanya iklim yang kondusif guna membantu petani beserta keluarga agar dapat berkembang menjadi dinamis serta mampu untuk memperbaiki kehidupan dan penhidupannya dengan kekuatan sendiri dan pada akhirnya mampu menolong dirinya sendiri (Soeharto, N.P.2005).

Selanjutnya dalam draf Revitalisasi Penyuluhan disebutkan bahwa penyuluhan pertanian adalah kegiatan pendidikan nonformal bagi petani dan keluarganya sebagai wujud jaminan pemerintah atas hak petani untuk mendapatkan pendidikan. Lebih lengkap lagi dijelaskan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), bahwa pengertian penyuluhan adalah: proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pendidikan nonformal bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, sebagai jaminan atas hak mendapatkan pendidikan, yang diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada guna memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan pendapatan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian beserta keluarganya, serta lebih luas lagi dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Penyuluhan Pertanian

Dalam undang-undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, disebutkan bahwa penyuluhan adalah perorangan warga Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian, baik merupakan penyuluhan PNS, swasta, maupun swadaya. Adapun yang menjadi tugas pokok penyuluhan adalah mempersiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan pertanian, sehingga penyuluhan dituntut mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyuluhan di lapangan, dengan menjadi mitra kerja petani sebagai fasilitator.

Sasaran Penyuluhan

Dalam UU No. 16 tahun 2006, disebutkan bahwa sasaran penyuluhan pertanian adalah pelaku utama dan pelaku usaha. Pelaku utama adalah petani yang merupakan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau koperasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropastur, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian

Sebagai tindak lanjut Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan Presiden pada Juli 2005, pada 3 Desember 2005 di Sumatera Selatan, Menteri Pertanian mencanangkan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP). Pada hakikatnya, Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah upaya mendudukkan, memerankan, dan memfungsikan serta menata penyuluhan pertanian agar terwujud kesatuan pengertian, kesatuan korp, dan arah kebijakan.

METODE PENULISAN

Prosedur Pengumpulan Data dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dan diolah dalam karya tulis ini merupakan data sekunder. Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan karya tulis ini dilakukan dengan pencarian data dan informasi dari laporan penelitian, makalah, media internet, media edukasi, berbagai literatur yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan penyuluhan pertanian lapangan (PPL), serta berbagai tulisan yang berhubungan dengan topik pembahasan.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah serta dianalisis secara kualitatif deskriptif berdasarkan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan melakukan pengelompokan data sesuai dengan sub-bab dalam tema penulisan karya tulis ini. Data yang telah dikelompokkan tersebut kemudian dianalisis mengenai kesesuaianya dengan ide penulisan karya tulis ini secara kualitatif deskriptif.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran karya tulis ini dimulai dengan memaparkan dan mengulas kondisi perkembangan penyuluhan yang ada di negara Indonesia, mulai dari awal peresmiannya, hingga saat ini. Selanjutnya, dipaparkan mengenai berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program revitalisasi penyuluhan, sehingga menjadi program yang kurang efektif. Dalam menanggapi kendala dan ketidakefektifan pelaksanaan program ini, maka kami mencoba memberikan berbagai alternatif solusi, yang ditujukan untuk meningkatkan peran pemerintah, institusi pendidikan, dan berbagai pihak terkait pelaksana program revitalisasi penyuluhan ini.

ANALISIS DAN SINTESIS

Dinamika Penyelenggaraan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan pertanian resmi dilaksanakan di Indonesia sejak 1 Januari 1905. Pada 1921, penyuluhan dilaksanakan Dinas Penyuluhan Pertanian, dalam bidang tanaman pangan dan perkebunan, disamping perkreditan (Abbas 1995). Gerakan penyuluhan pertanian Indonesia diprakarsai pemerintah, berbeda dengan gerakan penyuluhan Inggris dan Amerika yang diprakarsai masyarakat.

Sejak awal, penyuluhan pertanian di Indonesia dijadikan instrumen untuk mensukseskan program-program pemerintah. Periode 1945-1959, penyuluhan diintegrasikan dengan Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI). Penyuluhan pertanian dicirikan oleh pendirian Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD). Kegiatannya mendidik masyarakat desa menggunakan sistem tetesan minyak.

Periode 1959-1963 diterapkan sistem tetesan minyak, yang dicirikan peningkatan partisipasi petani secara sukarela, diubah menjadi gerakan massa. Penyuluhan diintegrasikan dengan gerakan swasembada beras. Permasalahan kekurangan pangan dalam periode ini dipecahkan dengan penyebarluasan dan penggunaan teknologi, melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Periode 1966-1986 merupakan periode keemasan. Penyuluhan pertanian ditempatkan dalam koordinasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan pendekatan sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU). Kegiatan penyuluhan cukup efektif dengan pendekatan pola pembangunan sentralistik, ditunjukkan dengan tercapainya swasembada beras tahun 1984. Hal ini menjadi puncak prestasi penyuluhan pertanian di Indonesia (Vitayala at al. 1998).

Periode 1984-1991 penyuluhan pertanian dikelola oleh Sekretariat Badan Pengendali BIMAS, untuk mempermudah mobilisasi Penyuluhan Pertanian mencapai sasaran intensifikasi dengan pendekatan sistem kerja LAKU. Pada periode ini, penyuluhan pertanian dijadikan instrumen untuk memecahkan masalah kelangkaan pangan khususnya beras. Dalam periode ini muncul gejala-gejala krisis penyuluhan pertanian di Indonesia. Pada periode 1991-2000,

dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Mentan Nomor: 539/kpts/LP.120/7/1991 dan Nomor 65 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di daerah, yang menyerahkan urusan penyuluhan pertanian kepada pemerintah daerah. Sehingga kondisi penyuluhan pertanian semakin parah. Dinamika penyuluhan pertanian menurun drastis, loyo, kekurangan gairah (*Vitayala et al.* 1998). Puspadi (2002) menemukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Indonesia dalam keadaan krisis kelembagaan, legitimasi, anggaran sehingga efektivitas dan kepuasan petani terhadap penyuluhan pertanian rendah.

Kondisi Penyuluhan Pertanian Masa Kini

Program revitalisasi berupaya memperbaiki sistem dan kinerja penyuluhan pertanian yang sejak akhir 1990-an sangat menurun kondisinya. Salah satu tonggak pelaksanaan revitalisasi adalah Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) No. 16 Tahun 2006. UU ini menyebutkan perlunya penataan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah tingkat pusat sampai kecamatan dan menyediakan sumber dana yang merupakan kontribusi pemerintah pusat dan daerah. UU ini merupakan satu titik awal pemberdayaan para petani melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan penyuluhan pertanian PNS, swasta, dan penyuluhan pertanian swadaya.

Dalam pelaksanaannya, program perbaikan sistem penyuluhan pertanian hingga saat ini masih mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut berasal dari pemerintah yang kurang siap dalam menstrategikan pelaksanaan program, kekurangsiapan para penyuluhan pelaksana program ini, serta masyarakat, terutama penggerak pertanian Indonesia, sebagai objek program penyuluhan.

Jumlah Tenaga Penyuluhan yang Belum Memenuhi Kebutuhan

Departemen Pertanian memiliki program “satu desa satu penyuluhan” di seluruh Indonesia untuk melaksanakan revitalisasi pertanian. Deptan telah mempersiapkan anggaran Rp 90 miliar guna merekrut 6.000 tenaga Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) dengan status kontrak pada 2007. Saat ini Indonesia

memiliki sekitar 70.000 desa, sehingga untuk memenuhi target program, diperlukan tenaga PPL sebanyak 70.000 orang.

Pada era Bimas (1980), penyuluhan berhasil membawa Indonesia menjadi negara swasembada beras. Saat itu, penyuluhan pertanian mencapai 37.000 orang. Namun kini tahun 2005 hanya 25.000 orang. Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan, kini Indonesia kekurangan 30.000 Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL). Untuk mengatasinya, pemerintah merekrut 10.000 PPL setiap tahun. Grafik 1 pada lampiran, menunjukkan bahwa khususnya di wilayah Jawa Barat saja, terdapat beberapa daerah yang belum terdistribusi tenaga PPL.

Kualitas Kinerja Penyuluhan Menurun Akibat Kebijakan Otonomi Daerah

Sejak kewenangan bidang penyuluhan pertanian dilimpahkan ke daerah seiring berlakunya Otonomi Daerah, terlihat kinerja para penyuluhan yang semakin memburuk. Pada awalnya, pelimpahan kewenangan penyuluhan ke daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyuluhan. "Namun secara umum justru kinerja penyuluhan cenderung semakin memburuk bahkan menunjukkan gejala kehilangan arah". (Menteri Pertanian Anton Apriyantono, dalam sambutan pada wisuda 726 lulusan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), Jakarta 2 Agustus 2008)

Setelah otonomi kabupaten berlaku, beberapa PPL dialihfungsikan menjadi pejabat struktural atau lainnya, sehingga jumlah PPL berkurang. PPL yang masih ada tidak lagi mendapat pelatihan, fasilitas, dan insentif yang cukup. Meskipun cukup senior sebagai PPL, mereka masih memerlukan pelatihan untuk penyebarluasan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi, misalnya pertanian organik. Karena itu, jika pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) ingin memajukan pertanian, maka harus berusaha memanfaatkan PPL yang tersisa dan tenaga penyuluhan lain untuk membantu para petani, misalnya dalam pengolahan hasil, pascapanen, pemasaran, benih unggul, dan pengendalian hama terpadu.

Persebaran Tenaga Penyuluhan yang Belum Merata di Seluruh Indonesia

Sebagian besar tenaga PPL yang ada masih terpusat pada daerah-daerah di Pulau Jawa. Padahal, para pelaku usaha pertanian di luar Pulau Jawa sangat banyak jumlahnya dan mereka lebih sangat membutuhkan bimbingan dari para

penyuluhan, karena terbatasnya akses terhadap informasi, teknologi, pasar, dan sebagainya, yang seharusnya teratasi dengan keberadaan para penyuluhan.

Sebagai contoh, sebaran tenaga penyuluhan perikanan lebih banyak terdapat di wilayah Jawa, sementara di luar Jawa banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian timur, dengan perbandingan 2:1. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 yang telah terlampir.

Orientasi Peran, Fungsi, dan Kerja Penyuluhan

Tercapainya swasembada beras untuk Provinsi Bali tahun 1980 dan untuk tingkat nasional tahun 1984, merupakan bagian dari peran PPL yang mulai direkrut tahun 1970. Mereka dididik dan dilatih serta diberi fasilitas dan insentif yang diperlukan, sehingga tahu, mampu, dan mau melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam membina petani, agar tahu, mampu, dan mau melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usahatani.

Keberadaan penyuluhan tentu diharapkan mampu menjadi pembina dan pembimbing dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, diharapkan penyuluhan pun mampu menjembatani antara petani dengan berbagai kebutuhan mereka, seperti akses informasi, teknologi, dan pasar. Namun dalam pelaksanaannya, hingga saat ini para penyuluhan terkesan memiliki orientasi yang hanya mengarah pada teknis administrasi saja. Dalam arti, “yang penting penyuluhan melakukan pekerjaannya”, namun tanpa kesadaran peran, fungsi, dan substansi yang jelas, akan arti dari keberadaan para penyuluhan ini.

Kualitas SDM Penyuluhan yang Kurang Memadai

Penyuluhan masih banyak yang awam terhadap informasi dan teknologi yang dibutuhkan oleh para petani. Hal ini mengakibatkan petani tidak memiliki kemampuan mengakses informasi maupun teknologi dengan baik, yang seharusnya bisa didapatkan dengan keberadaan para penyuluhan bagi petani.

Penyuluhan yang Ideal dan Paradigma Baru Penyuluhan

Sudah saatnya PPL mengubah paradigma penyuluhan itu sendiri. Peran penting PPL adalah sebagai fasilitator untuk membangkitkan dan memunculkan kemampuan dan kepercayaan diri petani untuk menganalisa pilihan-pilihan yang

ada serta konsekuensi dari setiap pilihan itu, dengan menumbuhkan rasa percaya diri petani untuk memecahkan persoalan mereka sendiri (Nurul Hilmati, 2009).

Saat ini tugas penyuluhan dan fungsi sistem penyuluhan telah termaktub dalam Undang-Undang no.16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Setiana (2005) bahwa penyuluhan dengan para penyuluhnya merupakan penghubung yang bersifat dua arah (*two way traffic*), yakni menghubungkan: (1) pengetahuan yang dibutuhkan petani dan pengalaman yang biasa dilakukan oleh petani, (2) pengalaman baru yang terjadi pada pihak para ahli dan kondisi nyata petani.

Selanjutnya perlu dipahami paradigma baru penyuluhan sebagai berikut:

1. Penyuluhan adalah Jasa Informasi

Penyuluhan pertanian harus mampu mempersiapkan, menyediakan dan menyajikan segala informasi yang diperlukan petani. Informasi-informasi tentang berbagai komoditas pertanian, pengolahan, dan pemasarannya perlu dipersiapkan dan dikemas dalam bentuk dan bahasa yang mudah dimengerti para petani

2. Lokalitas

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah menyebabkan penyuluhan pertanian harus lebih memusatkan perhatian pada petani dan kebutuhan pertanian di daerah kerja masing-masing. Pemahaman ekosistem daerah, lahan dan iklim, informasi kondisi daerah, dan pengarahan penerapan teknologi tepat guna menjadi tugas penting penyuluhan. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan lembaga sejenisnya harus lebih difungsikan aktifkan, bahkan diperluas penyebarannya.

3. Berorientasi Agribisnis

Penyuluhan pertanian merupakan sumber informasi petani untuk meningkatkan usahatani, dimulai dari subsistem hulu hingga subsistem hilir (pengolahan), serta subsistem penunjang. Pambudy (2003) menyatakan bahwa penyuluhan pertanian menjadi sangat penting dalam perannya menjembatani golongan ekonomi lemah. Penyuluhan diharapkan menghasilkan sumberdaya produksi, modal kerja, dan prasarana pokok, disamping layanan umum lain yang dibutuhkan penduduk miskin agar dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi.

Petani perlu mengadopsi prinsip agribisnis agar memperoleh pendapatan lebih besar dari hasil usahatannya. Prinsip dan teknologi yang terkait agribisnis harus dikembangkan dan dipelajari oleh penyuluhan. Penyuluhan pertanian di masa depan tidak terbatas pada aspek teknologi produksi pertanian saja, tetapi jauh lebih luas meliputi aspek ekonomi, teknologi pasca panen, pengolahan, pengemasan, dan lain-lain. Kerjasama dengan badan-badan yang menangani pengolahan dan produk-produk olahan itu juga sangat perlu dilakukan.

4. Pendekatan Kelompok

Interaksi antar petani dalam kelompok sangat penting, karena merupakan forum komunikasi yang demokratis di tingkat akar rumput (*grass root*). Untuk itu, para penyuluhan pertanian perlu memahami cara membina dan mengembangkan kepemimpinan kelompok agar tumbuh menjadi kelompok tani yang dinamis. Kelompok-kelompok dengan anggota yang dinamis dapat menjadi teladan untuk melancarkan pembangunan masyarakat desa yang berasal dari bawah (*bottom up*).

5. Fokus pada Kepentingan Petani

Para penyuluhan perlu lebih mendekatkan dirinya dengan petani dan lebih menghayati kepentingan-kepentingannya, serta mengubah pola loyalitas kepada atasan dan instansi tempatnya bekerja. Selain itu, penyuluhan pertanian harus benar-benar mampu mengidentifikasi kepentingan petani dan menuangkannya dalam program-program penyuluhan melalui kerjasama sejati dengan para petani.

6. Pendekatan Humanistik-Egaliter

Para penyuluhan pertanian perlu dibekali berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan masalah komunikasi sosial, psikologi sosial, stratifikasi sosial, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kondisi saling menghargai antara petani dengan penyuluhan.

7. Profesionalisme

Penyuluhan pertanian di masa depan harus dapat dilaksanakan secara profesional, dalam arti penyuluhan tepat dan benar secara teknis, sosial, budaya dan politik serta efektif karena direncanakan, dilaksanakan, dan didukung tenaga-tenaga ahli dan terampil yang telah disiapkan secara baik dalam suatu sistem penyuluhan pertanian yang baik pula.

Untuk itu perlu dilakukan penataan dan peningkatan peran dari lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang menangani tenaga-tenaga penyuluhan itu. Kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi perlu ditingkatkan agar dapat memanfaatkan potensi-potensi SDM yang ada di dalamnya.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban diperlukan agar penyuluhan pertanian mampu direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, agar proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas diperlukan sebagai penyeimbang prinsip otonomi penyuluhan yang sudah disarankan sebelumnya.

9. Memuaskan Petani

Petani akan merasa puas bila penyuluhan itu memenuhi sebagian ataupun semua kebutuhan dan harapan petani. Pendidikan, pelatihan dan keteladanan yang tepat dapat menghasilkan tenaga-tenaga penyuluhan yang mampu menyuluhan dengan sepenuh hati. Untuk itu lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk para penyuluhan harus disiapkan untuk dapat mengemban misi semacam itu.

Alternatif Solusi Guna Mendukung Revitalisasi Penyuluhan

Pihak-pihak yang berkontribusi dalam melakukan revitalisasi penyuluhan di Indonesia harus sesuai dengan asas, tujuan, dan fungsi penyuluhan dalam UU no.16 tahun 2006. Beberapa hal yang perlu dilakukan pihak-pihak yang terkait, sebelum mempersiapkan atau melakukan penyuluhan antara lain:

1. Kegiatan identifikasi

Kegiatan identifikasi merupakan suatu kegiatan awal yang mutlak harus dilakukan untuk mengenali secara menyeluruh kondisi daerah atau desa yang akan menjadi sasaran. Kegiatan identifikasi ini dilakukan berdasarkan pada: (a) demografi masyarakat (latar belakang masyarakat, umur, jenis kelamin, komoditas yang diusahakan, tingkat pendidikan), (b) potensi daerah secara spesifik, (c) kebutuhan masyarakat, dan (d) budaya masyarakat.

2. Perancangan dan pelaksanaan sistem penyuluhan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses identifikasi, maka dapat dirancang suatu sistem dan metode penyuluhan yang tepat yakni sesuai

dengan demografi, potensi daerah, serta kebutuhan dan budaya masyarakat. Kemudian rancangan tersebut diterapkan di masyarakat sasaran. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan memperhatikan tujuan yang hendak dicapai.

3. Pengawasan dan evaluasi

Kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan struktur bertingkat organisasi penyuluhan nasional. Evaluasi harus senantiasa dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan dapat mencapai tujuan penyuluhan.

4. Pengembangan sistem penyuluhan

Hasil evaluasi kemudian dijadikan sebagai bahan dalam pengembangan sistem penyuluhan. Hal terpenting dari kegiatan revitalisasi pertanian ialah mengubah orientasi pembangunan berbasiskan produksi menjadi pembangunan yang berorientasi manusia, yakni dengan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat menekankan pada kegiatan partisipatif setiap komponen masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan di atas membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Sebagai fasilitator dan pengatur jalannya penyuluhan pertanian adalah pemerintah. Sedangkan komponen penggeraknya tetap masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya lembaga lain yang dapat turut serta mensukseskan program revitalisasi penyuluhan, seperti institusi pendidikan, dan lain-lain.

Peran Institusi Pendidikan

Dalam hal ini adalah pengoptimalan peran dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia, sebagai sumber penemuan ilmu, inovasi, dan teknologi, serta sebagai wujud pengabdian institusi terhadap masyarakat. Dibutuhkan partisipasi baik dari tenaga pengajar hingga mahasiswa, dan juga lembaga-lembaga kemahasiswaan sebagai civitas akademika. Sebagai langkah nyata ialah setiap perguruan tinggi memiliki minimal satu desa binaan yang dekat dengan lokasi perguruan tinggi berada. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai 2800, bisa sangat mendukung suksesnya revitalisasi pertanian. Namun, banyaknya disiplin ilmu di setiap universitas, berpotensi untuk memberdayakan lebih dari satu desa.

Sebagai contoh adalah IPB yang memiliki sembilan fakultas yang mempunyai kompetensi berbeda-beda. Misalnya Fakultas Teknologi Pertanian

memiliki banyak teknologi tepat guna bagi petani, Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang sangat kompeten dalam pengembangan manajemen dan bisnis pertanian, dan sebagainya. Kelembagaan mahasiswa seperti BEM, Himpunan Profesi (Himpro) berbagai jurusan, dan beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa, juga memiliki program kerja Bina Desa.

Peran Pemerintah

Departemen Pertanian merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang sangat spesifik lingkup kerjanya, yakni di bidang pertanian, harus menjadi suatu penggerak utama dalam mengintegrasikan berbagai lembaga atau instansi yang ada untuk mendukung pengembangan kegiatan penyuluhan di Indonesia. Integrasi yang kuat antar kelembagaan haruslah didukung dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pengembangan penyuluhan-penyuluhan pertanian di Indonesia.

Deptan harus mampu mengakomodasi pendidikan penyuluhan secara menyeluruh. Artinya penyuluhan tidak hanya dibekali ilmu tentang budidaya, tetapi juga pengetahuan mengenai pengembangan masyarakat, pembiayaan pertanian, dan lain-lain. Langkah yang dapat ditempuh misalnya Deptan mensinergikan kerja sekolah penyuluhan dengan klinik agribisnis untuk menciptakan penyuluhan yang kompeten. Caranya dengan mengirimkan pakar atau ahli untuk mengampu setiap sekolah penyuluhan. Dengan demikian segala informasi terkait pertanian yang dibutuhkan calon penyuluhan dapat disampaikan dengan baik. Adanya sertifikasi bagi para lulusan akan menunjukkan kompetensi yang dimiliki.

Proses penyuluhan perlu mengacu pada UU No. 16 tahun 2006, dengan memantapkan fungsi Badan Penyuluhan Pusat dan Komisi Penyuluhan Nasional dalam menentukan kebijakan penyuluhan Indonesia. Kegiatan penyuluhan harus dilakukan terintegrasi antara badan pelaksana penyuluhan di berbagai tingkat wilayah, balai penyuluhan, dan pos penyuluhan di desa-desa yang merupakan suatu titik kegiatan penyuluhan terdekat dengan objek penyuluhan, yaitu petani.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sejak dicanangkan pada tahun 1905, kegiatan penyuluhan digunakan sebagai alat untuk mensukseskan program pemerintah sehingga sangat terkesan sentralistik. Keberhasilan dari mekanisme tersebut terlihat pada saat pemerintah berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Pada perkembangannya, mulai kira-kira tahun 1991, kegiatan penyuluhan dijadikan sebagai kekuasaan otonom masing-masing daerah sehingga menjadi awal krisis kegiatan penyuluhan di Indonesia sampai dengan sekarang ini.
2. Secara ideal kelembagaan penyuluhan dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) No. 16 Tahun 2006. Dalam pelaksanaannya, program perbaikan sistem penyuluhan pertanian masih mengalami berbagai kendala, diantaranya adalah: kekurangan jumlah tenaga penyuluhan (PPL), persebaran PPL yang tidak merata, kualitas kinerja yang menurun, ketidaksesuaian orientasi peran, fungsi, dan kerja penyuluhan, serta kualitas SDM penyuluhan yang kurang memadai.
3. Dalam mengatasi berbagai kendala pelaksanaan revitalisasi penyuluhan, diperlukan kerja dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, yaitu pemerintah, institusi pendidikan, beserta seluruh masyarakat, khususnya para pelaku pertanian sebagai objek dari pelaksanaan program ini.

Saran dan Rekomendasi

Masyarakat dan civitas akademika harus secara mandiri dan konsisten ikut membantu pelaksanaan program revitalisasi pertanian di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga harus mendukung dan mendorong peran-peran pihak tersebut dengan menetapkan kebijakan yang khusus ditujukan untuk meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dan civitas akademika. Misalnya adalah menetapkan kebijakan yang wajibkan setiap perguruan tinggi untuk memiliki minimal satu desa binaan dan kebijakan tersebut berlaku secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.diperta.jabarprov.go.id/index.php?mod=Database&idMenuKiri=539&idKategori=5&link=dataDBJumlahPenyuluhanDanRasio>

http://ntb.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=141

<http://www.sasak.org/univ-ks/52-pertanian/766-meninjau-kembali-pendekatan-penyuluhan-pertanian-kita.html>

<http://banyuagung.wordpress.com/2009/01/23/hasil-ujian-tertulis-calon-tenagaharian-lepas-thl-penyuluhan-pertanian-departemen-pertanian-tahun-2008/>

Pambudy, R. 2003. *Penyuluhan Dalam Sistem dan Usaha Agribisnis : Strategi Pengembangan Modal Manusia Indonesia*. IPB Press.

Perspektif Penyuluhan Pertanian Berwawasan Agribisnis.
<http://www.sinartani.com/>

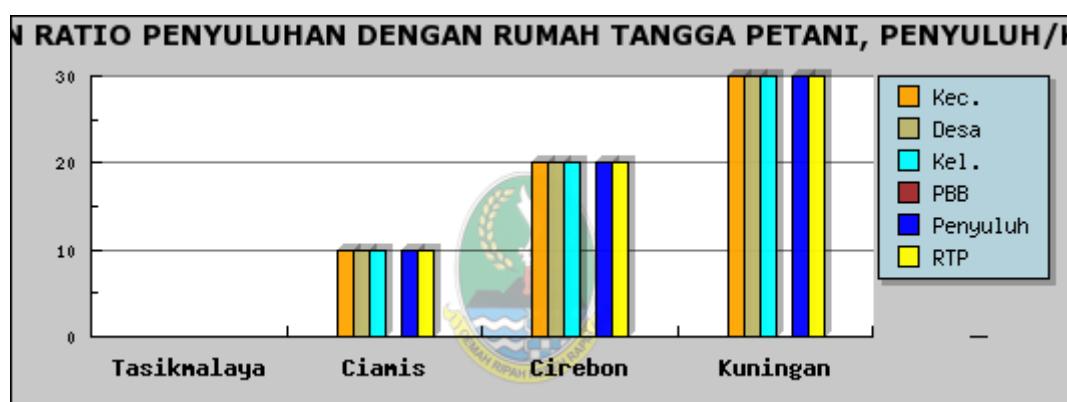
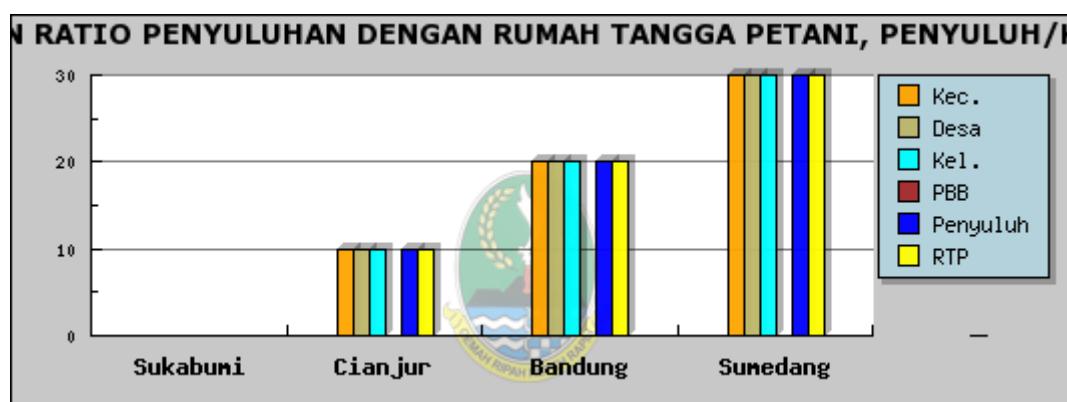
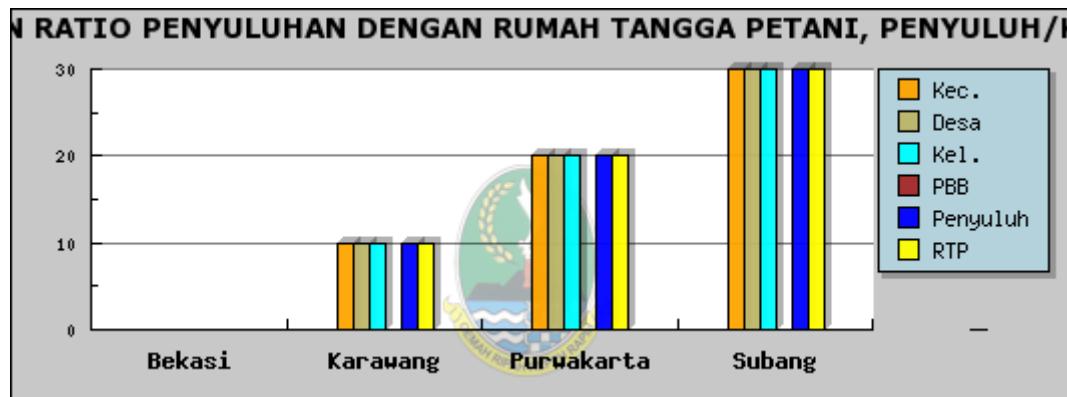
Setiana, L. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Ghalia Indonesia.

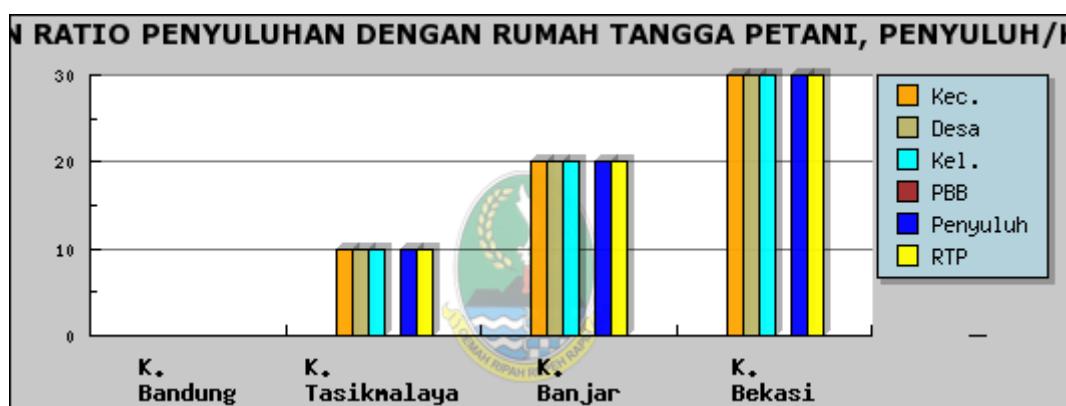
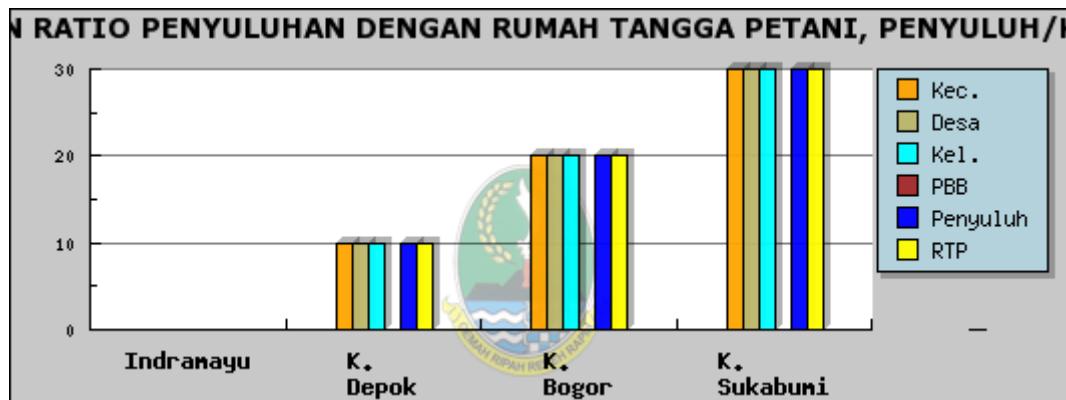
Slamet, Margono. 2006. *Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah*. Makalah dalam Pelatihan Penyuluhan Pertanian di Universitas Andalas.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pendukung

Grafik 1. Jumlah Penyuluhan Pertanian, PBB, dan Ratio Penyuluhan dengan Rumah Tangga Petani, Penyuluhan/Kecamatan di Jawa Barat Tahun 2005





Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Barat, 2005

Tabel 1. Peta Kebutuhan Rekruitmen Tenaga Penyuluhan Perikanan 2009 – 2013

No.	Wilayah	Jumlah Tersedia	Rencana Kebutuhan/Rekruiement Penyuluhan Perikanan per Tahun(Orang)					
			2009	2010	2011	2012	2013	Total
1.	Indonesia Barat	1.455	520	534	527	520	534	4.090
2.	Indonesia Tengah	689	680	600	760	760	610	4.099
3.	Indonesia Timur	696	679	670	688	688	670	4.091
Total PPL		2.840	1.879	1.804	1.975	1.968	1.814	12.280

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan, Rencana Kebutuhan Penyuluhan Perikanan 2008-2013

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Daftar Riwayat Hidup Penulis (1)

Nama : Firza Maudi
Tempat / tanggal lahir : Semarang, 1 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
Departemen / Fakultas : Agribisnis / Ekonomi dan Manajemen
Agama : Islam
Alamat : Pondok Deboy
Babakan Lio Kompleks IPB Balumbang Jaya
No.8 RT 02/RW 09 Dramaga-Bogor
No Telp : 085710001947

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD H. Isriati Semarang (1994 – 2000)
 2. SMP Negeri 3 Semarang (1994 – 2000)
 3. SMA NEgeri 3 Semarang (2000 – 2003)
 4. Program Studi Agribisnis IPB (2006 – sekarang)

ORGANISASI

1. Sie Rohani Islam SMA 3 Semarang
 2. Ketua Seksi Tugas Jalan PKS SMA 3 Semarang
 3. Staf Departemen Hubungan Luar HPMA-IPB (2007 – 2008)

PRESTASI

1. PKM Kewirausahaan dan PKM Pengabdian Masyarakat didanai DIKTI Tahun 2008
 2. Finalis KPKM Tingkat Nasional Tahun 2008 di Surabaya
 3. Peringkat IV KKT M Seni Tingkat Nasional Tahun 2008 di Jogjakarta
 4. PKM Kewirausahaan didanai DIKTI Tahun 2009

Daftar Riwayat Hidup Penulis (2)

Nama Lengkap : Syura Awathif Ahmad Abdul Wadud
Tempat / Tanggal lahir : Ungaran, 12 Juli 1988
Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
Departemen / Fakultas : Agribisnis / Ekonomi dan Manajemen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nomor Handphone : 0856 935 936 95
E-Mail : syura_aaa_wadud@yahoo.co.id
Alamat Rumah : Jl. Anggrek IV RT 02 / RW 02 Bergas Kidul
Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah

PENDIDIKAN FORMAL

1. RA Islam Assalamah Ungaran (1992 – 1994)
 2. SD Islam Istiqomah Ungaran (1994 – 2000)
 3. SLTP N 1 Ungaran (2000 – 2003)
 4. SMA N 2 Semarang (2003 – 2006)
 5. Agribisnis - Institut Pertanian Bogor (2006 – sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Divisi Syiar LDK DKM Al-Hurriyyah IPB (2006 – 2007)
 2. Kepala Departemen Hubungan Luar - HIPMA IPB (2007 – 2008)
 3. Bendahara Umum UKM Century IPB (2008 – 2009)
 4. Kepala Department of Social and Environment Life (d'SouL) - HIPMA IPB (2009)

PRESTASI

1. PKM Kewirausahaan didanai DIKTI Tahun 2008
 2. Finalis KPKM Tingkat Nasional Tahun 2008 di Surabaya
 3. Peringkat IV KKT M Seni Tingkat Nasional Tahun 2008 di Jogjakarta
 4. PKM Pengabdian Masyarakat didanai DIKTI 2009

Daftar Riwayat Hidup Penulis (3)

Nama Lengkap	: Fithriani Rahayu S.M
NIM	: H34070080
Departemen	: Agribisnis
Fakultas	: Ekonomi dan Manajemen
Universitas	: Institut Pertanian Bogor
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 18 Maret 1991
No. HP	: 085642408149
E-mail	: pietz_xpi@yahoo.com
Alamat	: Jl.Merdeka no.27 Purwokerto, Jawa Tengah

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Melati Suci – Batang (1996)
2. SDN I Sumber – Cirebon (2002)
3. MTs Assalaam – Solo (2004)
4. SMA Assalaam – Solo (2007)
5. Agribisnis - Institut Pertanian Bogor (2007 – sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara PSDM PSM IPB Agria Swara
2. Ketua Pembinaan AgriaSwara'45 menuju konser d'Amora
3. Sekretaris IKMAS BOGOR

PRESTASI

1. Peserta Festival Paduan Suara ITB bersama AgriaSwara dalam dua kategori, yakni Female Choir (yang meraih Golden Diplome) dan Mixed Choir (yang meraih Silver Diplome).
2. Anggota/penyanyi konser tahunan Agria Swara 2009, “Eulogy to the joy of singing”.